

**PERBANDINGAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA YANG MEMPEROLEH OPINI WTP
DAN NON WTP**

Tesis

Oleh

ANIFA YASMIN



**PROGRAM PASCASARJAMA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

Perbandingan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP Dan Non WTP

Oleh

ANIFA YASMIN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris adanya perbedaan kinerja antara pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP dan Non WTP.

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive judgment sampling*. Kemudian, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis Uji beda *Independent Sample t-Test*.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kinerja pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP dan Non WTP. Implikasi penelitian yang dapat digunakan yaitu temuan ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para *stakeholder* untuk tidak mengabaikan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pertumbuhan produk domestik regional bruto yang merupakan salah satu komponen perhitungan produk domestik bruto nasional, dan opini audit dalam pengambilan keputusan, agar kabupaten/kota di Indonesia menjadi daerah yang benar-benar berkualitas, baik secara pengelolaan keuangannya, penyelenggaraan pemerintahannya, pertumbuhan ekonominya, maupun juga secara kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan.

Kata kunci: evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah, Produk domestik regional bruto, opini audit

ABSTRACT

COMPARISON OF DISTRICTS/MUNICIPALITIES' PERFORMANCE BETWEEN WHOM ACHIEVED UNQUALIFIED OPINION AND NON UNQUALIFIED OPINION

By

ANIFA YASMIN

This study is intended to empirically examines the comparison of districts/municipalities' performance between whom achieved unqualified opinion and non unqualified opinion.

The samples used in this study were collected using purposive judgment sampling method.

the results of this study show that there are different performances between districts/municipalities that achieved unqualified opinion and non unqualified opinion. The contribution that might be used is not to ignore EKPPD and GDRP in decision making in order to achive well managed districts/municipalities.

Keywords: The evaluation of government's performance, Gross Domestic Regional Product, audit opinion.

**PERBANDINGAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA YANG MEMPEROLEH OPINI
WTP DAN NON WTP**

Oleh

ANIFA YASMIN

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU SAINS AKUNTANSI**

Pada

**Program Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJAMA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : **PERBANDINGAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA YANG MEMPEROLEH OPINI
WTP DAN NON WTP**

Nama Mahasiswa : **ANIFA YASMIN**

NPM : **1421031016**

Jurusan : **Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi**

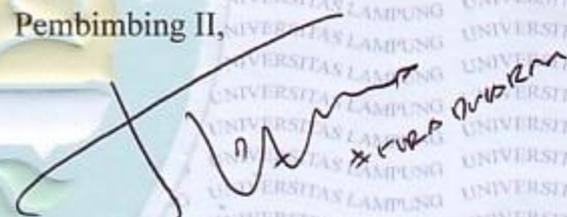
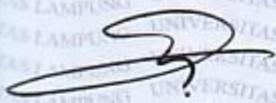
Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., CA.

Fitra Dharma, S.E., M.Si.

NIP 19700817 199703 2 002

NIP 19761023 200212 1 002

Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung

Ketua,



Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.

NIP 19691008 199512 2 001

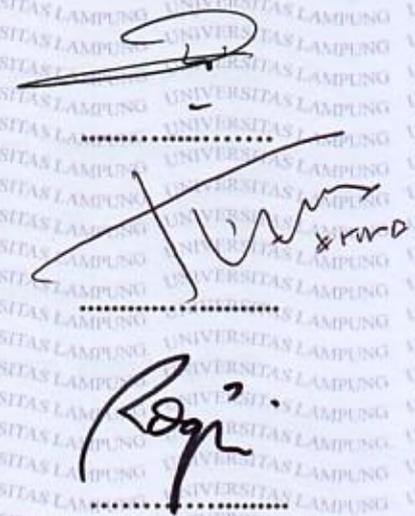
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., CA.

Sekretaris : Fitra Dharma, S.E., M.Si.

**Penguji
Bukan Pembimbing: Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**



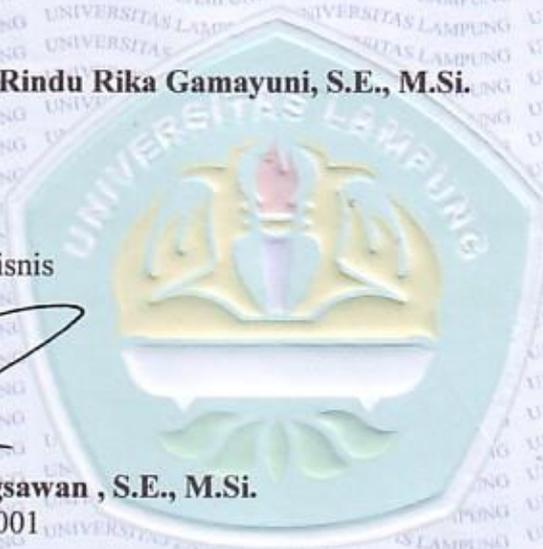
**2. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Dekan**

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 001

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 06 Juni 2016



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Perbandingan Kinerja Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP Dan Non wtp" adalah karya saya dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak atas intelektual karya ilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada pihak Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat adanya kekeliruan, saya bersedia menanggung dan sanksi yang diberikan dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2016.

Yang bertandatangan,



ANIFA YASMIN
NPM. 1421031016

Karya kecil ku ini,

Anifa persembahkan kepada:

Tuhanku Allah SWT, yang selalu ada untuk ku

Yang Tersayang Mama dan Papa

Yang Terkasih Teman-Teman Seangkatan

Serta Almamaterku Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ku ucapkan kepada Tuhan Ku Allah SWT. Dialah Sahabat ku yang setia. Tak pernah henti-hentinya kasih dan Rahmat Nya tercurah dalam hidup ku hingga terselesainya tesis ku ini.

Skripsi dengan judul “PERBANDINGAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMPEROLEH OPINI WTP DAN NON WTP” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M. Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung;
4. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D.,Akt., selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.,CA., selaku Pembimbing I atas kesediaannya memberikan bimbingan dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian tesis ini;
6. Bapak Fitra Dharma, SE., M.Si., selaku Pembimbing II yang selalu bersedia untuk memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyelesaian tesis ini;
7. Ibu Rindu Rika Gamayuni, SE., M.Si., selaku Pembahas I pada ujian tesis atas masukan dan saran yang telah diberikan;
8. Ibu Yuztitya Asmaranti, SE., M.Si., selaku Pembahas II atas masukan dan saran yang telah diberikan

9. Seluruh anggota staf dan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung;
10. Papa, mama, (terima kasih untuk motivasi, doa, semangat, ketulusan, kasih sayang, perhatian, dan telah menjadikan anifa lebih dewasa).
11. Sahabat-sahabat terbaikku: Henny Evita Minarully Gultom(terima kasih untuk keceriaannya), Mega Suryani (terima kasih untuk kemandirian yang kau ajarkan), Nani Oktavia (teman seperjuanganku mengejar pembimbing, seorang yang paling dapat kuandalkan dan kumintai saran), Bernadeta Eva Mariani (terima kasih untuk kedewasaan), Acep Supiani (terima kasih atas ketegaran dan perjuangan hidup yang kau ajarkan kepada ku), Desi Puspitawati (terima kasih untuk doa, dan semangatnya). Aku takkan menyesal pernah berkuliah diUnila, karena aku telah mengenal kalian sebagai sahabat dan saudari ku.
12. Teman-teman satu angkatan dan seperjuangan: Dewi, Dwi, Feria, Endang, Firda, Fadri, Sidiq, Opi, Reny, Juwe, Sukani, Ida, Yuk Ani, Zay.
13. Sahabat-sahabat SMU ku ;Carin, Devi, Citra, JP, Maria, Novita dan Dhona, yang selalu ada untuk mendengarkan keluhan dan permasalahan ku.
14. Pak Sobari atas penjelasan mengenai Tesis dan birokrasinya, Mas Andri, MbK Leni, MbK Ersi, Mas Leman, Mas Wawan, Yana Suryana dan MbK Yati.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proses penyelesaian Tesis ini karena itu penulis menerima semua saran dan kritik yang membangun.

Akhir kata Penulis Mengucapkan “Terima Kasih”.

Bandarlampung, Juni 2016

Penulis,

Anifa Yasmin

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	8
I.3. Tujuan	8
I.4 Manfaat	8
II. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Teori Stakeholder	9
2.2. Kerangka Teori	9
2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik	9
2.2.2. Kinerja Pemerintah	10
2.2.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..	11
2.2.4. Maksud Dan Tujuan EKPPD	16
2.2.5. Produk Domestik Regional Bruto	16
2.2.6. Indikator-Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	16
2.2.7. Opini Audit	18
2.3. Penelitian Terdahulu	20
2.4. Hipotesis	22
III. METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Sampel Dan Data Penelitian.....	28
3.2. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	28
3.3. Metode Analisis Data	29
3.3.1. Uji Normalitas Data	29
3.3.2. Pengujian Hipotesis.....	29

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Statistik Deskriptif	30
4.1.1. Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP Tahun Anggaran 2011-2013	31
4.1.2. Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini Non WTP Tahun Anggaran 2011-2013	33
4.1.3. Perbandingan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan Non WTP Tahun Anggaran 2011- 2013	35
4.2. Hasil Pengujian Hipotesis	37
4.2.1. Hipotesis Pertama Dan Pembahasan	37
4.2.2. Hipotesis 2 Dan Pembahasan Untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	39
4.2.3. Hipotesis 2 Dan Pembahasan Untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan	41
V. SIMPULAN, IMPLIKASI KETERBATASAN DAN SARAN	44
5.1. Simpulan	44
5.2. Implikasi Penelitian	44
5.3. Keterbatasan Dan Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011-2014	2
Tabel 1.2 Perkembangan Status EKPPD Tahun 2011-2013.....	5
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	28
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kot	31
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kot	33
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kot	35
Tabel 4.4 Hasil Pengujian <i>Independent Sample t-Test</i> Untuk EKPPD.....	37
Tabel 4.5 Hasil Pengujian <i>Independent Sample t-Test</i> Untuk PDRB	39
Tabel 4.6 Hasil Pengujian <i>Independent Sample t-Test</i> Untuk PDRB	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Model Penelitian	22

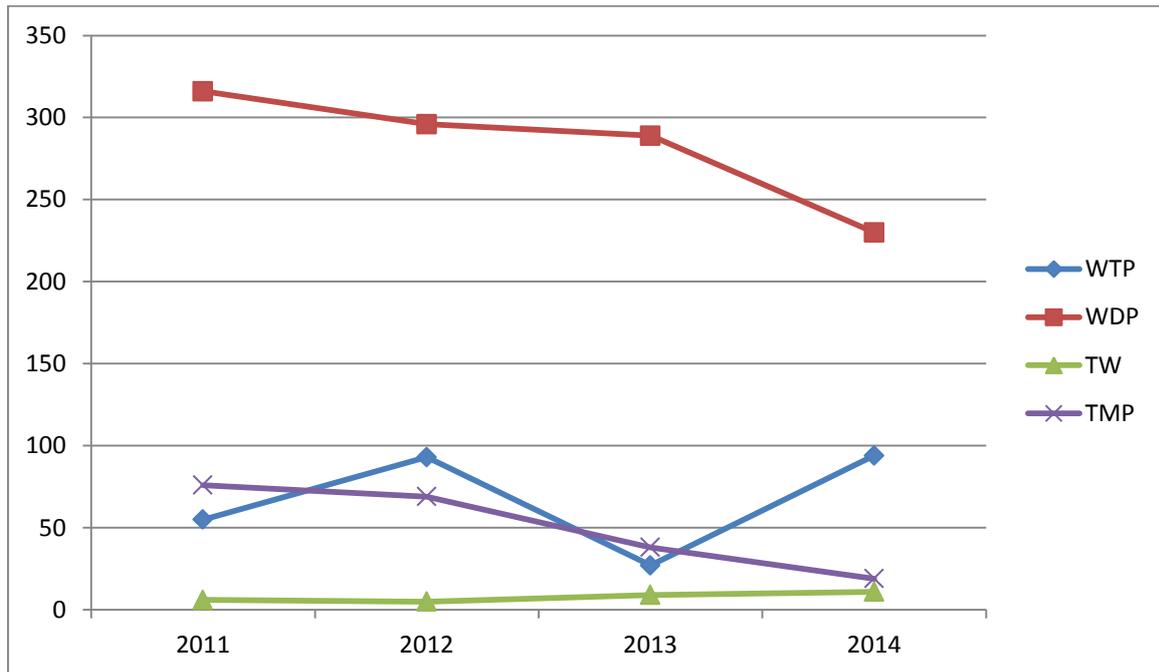
BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 102 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan daerah dan wajib diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit laporan keuangan.

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK RI tahun 2013 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012 untuk 415 Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tercatat bahwa 113 Pemerintah Kabupaten/Kota meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 267 Pemerintah Kabupaten/Kota meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 4 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan opini Tidak Wajar (TW), serta 31 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dari opini LKPD tahun 2011 tampak perkembangan yang positif dari opini LKPD tahun-tahun sebelumnya. Secara lengkap perkembangan opini LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota secara nasional untuk audit LKPD tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011 – 2014



Sumber: BPK RI, 2014

Berdasarkan tabel perkembangan opini LKPD tahun 2011 sampai dengan 2014, tampak suatu perkembangan dan prestasi yang positif bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangannya, dimana dari tahun ke tahun pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya terus bertambah, meskipun pertumbuhannya masih belum sesuai harapan. Kabupaten/kota yang mendapatkan opini WTP memang bertambah dari tahun ke tahun, tetapi trennya tidak diikuti dengan pencapaian skor EKPPD kabupaten/kota yang masuk dalam kategori sangat tinggi.

Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD (Heriningsih, 2014). Didapatkannya opini wajar tanpa pengecualian terhadap suatu kabupaten/kota, diharapkan kinerja ekonomi, dilihat dari pertumbuhan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar kepada masyarakat di kabupaten/kota tersebut juga telah lebih baik daripada

kabupaten/kota yang belum menerima opini wajar tanpa pengecualian. Pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga juga memerlukan suatu evaluasi (Khairudin, 2013).

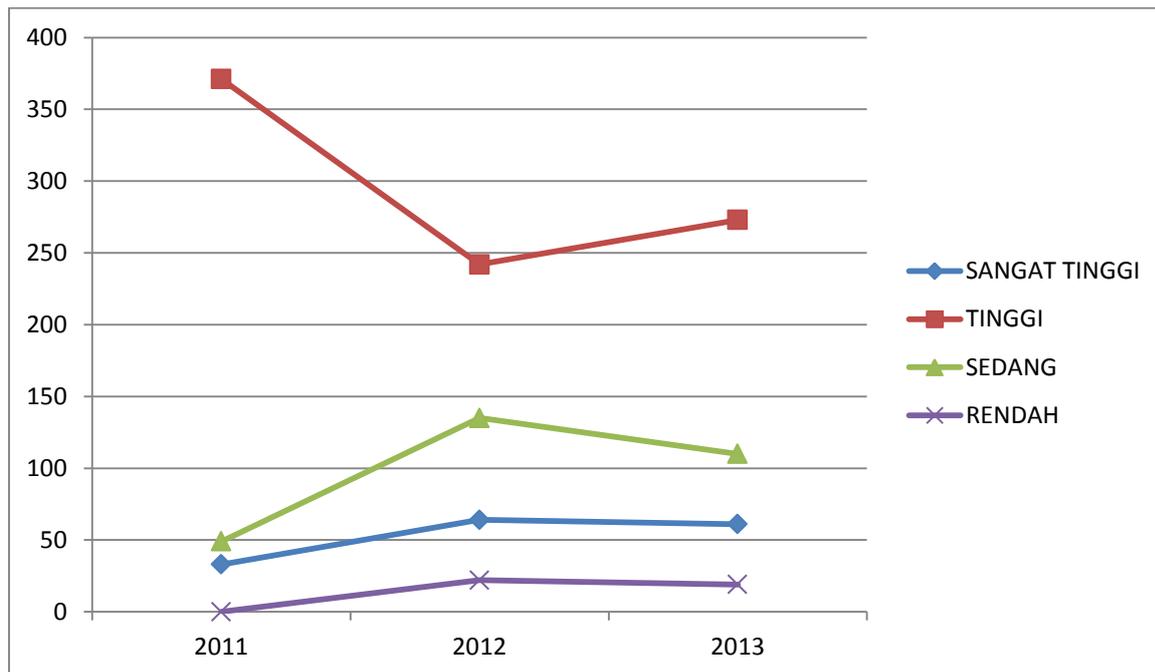
Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Penelitian yang dilakukan Azhar (2008) mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2006). Menurut Westin (1998), kinerja dapat menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Oleh karena itu kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya (*progress report*). Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998).

Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Halachmi, 2005). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa

mendatang (Bastian, 2001). Penelitian yang dilakukan Mandell (2006) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pelaksanaan program kerja pemerintah dapat di evaluasi apakah telah efektif, ekonomis, dan efisien. Dari prespektif akuntansi, sistem akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik menjadi sangat penting, karena sebagai alat pengukur kinerja dan menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Sehingga bila dikaitkan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah maka sangat penting untuk adanya evaluasi terhadap pelaporan kerjanya. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 (PP No. 6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja pemerintah daerah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan (Mirza, 2012).

Tabel 1.2 Perkembangan Status EKPPD Tahun 2011 – 2013



Sumber: KEPMENDAGRI, 2014

Berdasarkan tabel perkembangan status EKPPD tahun 2011 sampai dengan 2013, tampak suatu perkembangan dimana dari tahun ke tahun pemerintah daerah yang memperoleh status sangat tinggi laporan penyelenggaraan pemerintah daerahnya terus bertambah. Tetapi bila dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memperoleh status tinggi dan sedang, pemerintah daerah yang memperoleh status sangat tinggi jumlahnya relatif lebih sedikit. Sebuah daerah yang memperoleh opini audit WTP diharapkan juga memperoleh skor EKPPD yang tinggi sehingga menjadi cerminan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik, tetapi Kota Metro pada tahun 2012 memperoleh opini WTP (IHPS 2013) tetapi skor EKPPD dari Kemendagri hanya mendapat nilai 0.9733 yang merupakan peringkat terendah (nomor 91) dalam peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan 91 (sembilan puluh satu) kota secara nasional. (Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2012). Menurut Evana (2012) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah daerah

belum dapat dijadikan parameter atau jaminan atas keberhasilan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, karena Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya terbatas pada keberhasilan administratif saja.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan tingkat pendapatan nasional per kapita dari aspek ekonominya untuk melihat kinerja ekonomi dari pemerintahan di daerah tersebut. Dalam suatu wilayah regional atau daerah, maka kesejahteraan masyarakat diukur melalui Produk Domestik Regional bruto (PDRB) per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya, Jumlah dan Kualitas Dari Penduduk dan Tenaga kerja, Kapital, Tingkat Teknologi, Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat (Wiguna, 2013).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharapkan adanya perubahan kesejahteraan masyarakat yang merata yang merupakan tujuan pembangunan ekonomi. Dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara atau wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari situ dapat terlihat kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan dan dicapai di suatu daerah selama periode tertentu (Wiguna, 2013). Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Dengan didapatkannya opini wajar tanpa pengecualian terhadap suatu kabupaten/kota, diharapkan kinerja ekonomi juga meningkat yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto. Setiap daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Ahmad, 2011). Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012 memperoleh opini WTP (IHPS,2013) tetapi PDRB pada tahun 2012 senilai Rp 1.136.000.000.000, turun sebesar Rp 442.000.000.000 dari

tahun 2011 yaitu senilai Rp 1.578.000.000.000 (Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Indonesia 2009-2013, 2014).

Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah dan perubahan perekonomian masyarakat merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*). Jika pengelolaan keuangan suatu daerah sudah baik tercermin diperolehnya opini audit wajar tanpa pengecualian, diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga baik, yang mengindikasikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut (Mirza, 2012). Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan perbandingan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan yang memperoleh opini Non WTP dengan judul “Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dan Non WTP”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas kinerja. Guna mencapai sasaran yang diharapkan, maka ditetapkan perumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP dan Non WTP
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja ekonomi yang diukur dari perubahan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP dan Non WTP

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja ekonomi yang diukur dari perubahan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP dan Non WTP

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan Non WTP.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Memberikan bukti empiris mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi yang telah mendapatkan opini WTP dan Non WTP di Indonesia.
 - b. Menambah referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai informasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahannya dan pertumbuhan ekonomi.
 - b. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk pengambilan keputusan.

BAB II. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja atau *stakeholder* suatu organisasi bertanggungjawab (Freeman dan Veal, 2001). Organisasi harus menjaga hubungan dengan *stakeholdernya* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholdernya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional organisasi, misal tenaga kerja, dan pembelanjaan lainnya (Chariri dan Ghazali, 2007). Organisasi swasta maupun publik harus bersedia menyiapkan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingannya atau *stakeholder* (Mahmudi, 2006). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, pemerintah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Hal ini dikarenakan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan digunakan oleh *stakeholder* untuk menilai pengukuran kinerja keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya (bila ada), yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau

perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Kasmir (2008) mendefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sementara itu Halim (2002) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pada periode tertentu.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan (Mahsun, dkk 2009) dan informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam memuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa berkualitas (Mahmudi, 2006). Informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik dapat dilihat dari laporan keuangan (Mahsun dkk, 2009). Artinya informasi tentang posisi keuangan publik dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan dapat diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.2.2 Kinerja Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Bastian (2001) menjelaskan bahwa definisi

kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat penciptaan pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Artinya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi dimasa yang akan datang. Pelaporan kinerja pemerintah melalui laporan keuangan merupakan wujud dari proses akuntabilitas (Mahsun dkk, 2009). Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga masyarakat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (*users*) bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta unitnya (Mardiasmo, 2006).

Kinerja organisasi sektor publik tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh. Kinerja organisasi sektor publik bukan entitas bisnis yang mencari laba. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik (Krisna, 2008). dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh dibawah standar (ukuran mutu). Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik menjadi sulit dan kompleks.

2.2.3 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Di dalam Pasal 5 Permendagri No.73/2009, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai sumber informasi utama EKPPD yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan (Noviando, 2015).

Menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja berfungsi untuk (1) memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat; (2) ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan; (3) untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap kinerja, pemerintah daerah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian atau hasil yang diperoleh. Jadi dapat dikatakan pengukuran kinerja penting untuk dilakukan karena berpengaruh terhadap publik.

Kinerja tata kelola Pemda yang dituangkan dalam LPPD memerlukan adanya evaluasi yang disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009. Selain LPPD, informasi pelengkap untuk EKPPD ini antara lain laporan pertanggungjawaban APBN, informasi keuangan daerah dan laporan kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil dari EKPPD tersebut berupa Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Sedyaningsih dan Zaky, 2015)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Hasil EKPPD tahunan digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

EKPPD merupakan suatu sistem yang pengukuran dengan menggunakan Nilai indeks komposit kinerja (IKK) dalam penilaian yang terintegrasi dengan mandiri oleh pemerintah daerah dengan yang dilakukan oleh Tim Daerah dan Tim Nasional EPPD (Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Sehingga IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah (Heriningsih, 2014).

EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka upaya perubahan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan ditingkatkannya akuntabilitas oleh pemerintah daerah, maka informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah. Pengawasan dari semua pihak terhadap jalannya pemerintahan diharapkan akan meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah.

Indikator kinerja kinerja kunci yang digunakan sebagai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari : pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks GINI, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk, persentase penduduk di atas garis kemiskinan, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja, angka

kriminalitas yang tertangani, jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga, jumlah gedung olahraga.

Aspek pelayanan umum yang terdiri dari angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata, angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik, per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, persentase luas permukiman yang tertata, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan, jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio izin trayek, jumlah ujian kir angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis, jumlah investor berskala internasional (PMDN/PMA), rasio daya serap tenaga kerja, persentase koperasi aktif, jumlah UKM non BPR/LKMUKM, jumlah BPR/LKM, rasio penduduk yang memiliki KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah, angka partisipasi angkatan kerja, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga swasta, rasio KDRT, persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, rata-rata jumlah anak per keluarga, rasio akseptor KB, jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet-terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radi/tv lokal, persentase luas lahan bersertifikat, rata-rata jumlah kelompok pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), rata-rata jumlah kelompok binaan

PKK, jumlah LSM, jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 jumlah penduduk, jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk, rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan, jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga.

Aspek daya saing daerah yang terdiri dari angka konsumsi RT per kapita, perbandingan faktor produksi dengan produk, persentase konsumsi RT untuk non pangan, dihitung produktivitas daerah setiap sektor pada 9 sektor, pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, jasa, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya, persen rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persen rumah tangga yang menggunakan listrik, persen penduduk yang menggunakan HP/telepon, jenis, kelas dan jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel, angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persen desa yang berstatus swasembada terhadap total desa, rasio lulusan S1/S2/S3, rasio ketergantungan.

Di antara indikator kinerja kunci di atas yang digunakan untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perhitungannya untuk mengetahui angka usia harapan hidup dengan cara perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

2.2.4 Maksud Dan Tujuan EKPPD

1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan.
2. Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong perubahan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Sebagai dasar pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka perubahan kapasitas daerah, sebagaimana Perpres No. 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto

Indikator kinerja pembangunan daerah menurut Bappenas (2014) terdiri dari (1) aspek ekonomi daerah, dengan indikator pertumbuhan PDRB non migas, PDRB per kapita, Rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi, dan angka kemiskinan, (2) aspek keuangan daerah dengan indikator meliputi dependensi fiskal, kapasitas penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal, dan kontribusi sektor pemerintah, (3) pelayanan publik terdiri jumlah siswa per sekolah, jumlah siswa per guru, ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan dan kualitas infrastruktur, dan (4) aparatur daerah terdiri dari indikator kualitas aparatur yang berstatus PNS, persentase aparatur pendidik, persentase aparatur paramedik (tenaga kesehatan), aspek kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Penyelenggaraan pemerintah daerah atas indikator kinerja pembangunan tersebut secara lengkap sebagai berikut :

2.2.6. Indikator-indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Aspek/Fokus Indikator

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| Ekonomi Daerah | 1. Pertumbuhan PDRB Non Migas |
| | 2. PDRB per Kapita |

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rasio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi 4. Angka Kemiskinan 5. Perekonomian dan kesejahteraan
Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dependensi fiskal 2. Kapasitas penciptaan pendapatan 3. Proporsi belanja modal 4. Kontribusi sektor pemerintah
Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah siswa per sekolah 2. Jumlah siswa per guru 3. Ketersediaan fasilitas kesehatan 4. Ketersediaan tenaga kesehatan 5. Kualitas infrastruktur
Aparatur Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas aparatur yang berstatus PNS 2. Persentase aparatur pendidik 3. Persentase aparatur paramedik (tenaga kesehatan)
Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat

Sumber : Bappenas, 2014.

Todaro dan Smith (2003) dalam (Taher, 2011) mengemukakan bahwa sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNI, baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan memberikan efek penetes ke bawah (trickle down effect). Akibatnya timbul berbagai permasalahan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan serta berbagai permasalahan pembangunan lainnya. Oleh karena itu, ukuran pembangunan tidak saja dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi tetapi perlu secara utuh mencakup multi dimensional (Dewi, 2015). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dengan menghilangkan unsur-unsur *intermediate cost*-nya. PDRB dapat dikatakan sebagai ukuran produktivitas wilayah yang paling umum dan paling diterima secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam skala wilayah dan negara, tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak melakukan pengukuran PDRB (Rustiadi dkk. 2011).

2.2.7. Opini Audit

Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan LPPD suatu Pemda sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan (fraud). Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

Selain LPPD yang berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, maka sebetulnya terdapat laporan kinerja yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan. LKPD merupakan laporan keuangan pemerintah daerah, yang merupakan laporan eksternal dari pemerintah yang tidak akan terlepas dari pengawasan para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah maka laporan keuangan perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Kawedar, 2008). Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memuat opini audit. Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Artinya opini audit merupakan suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa terdapat empat jenis opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Masing-masing opini tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mahmudi (2006) menjelaskan bahwa “opini yang paling baik adalah wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)”. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan karena auditor meyakini bahwa laporan keuangan telah dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. Keyakinan auditor tersebut berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan.

2. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Opini wajar dengan pengecualian menunjukkan bahwa sebagian besar pos dalam laporan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan atau untuk pos-pos tertentu disajikan secara tidak wajar.

3. Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*)

Opini tidak wajar adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Keadaan seperti ini bisa terjadi karena buruknya sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi yang ada (Mahmudi, 2006).

4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer Opinion*)

Pernyataan menolak memberikan opini adalah opini yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Mahmudi (2006) menjelaskan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat atas hasil audit laporan keuangan karena dua alasan, yaitu auditor terganggu independensinya dan auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu.

2.3. Penelitian Terdahulu

Budiartha (2008) meneliti tentang analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2007. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *current ratio* dan *debt to total equity*. Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara tahun 2007 lebih baik dibandingkan 2006. Hal ini meyakinkan masyarakat bahwa upaya pemerintah untuk melakukan reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara telah berhasil dilakukan.

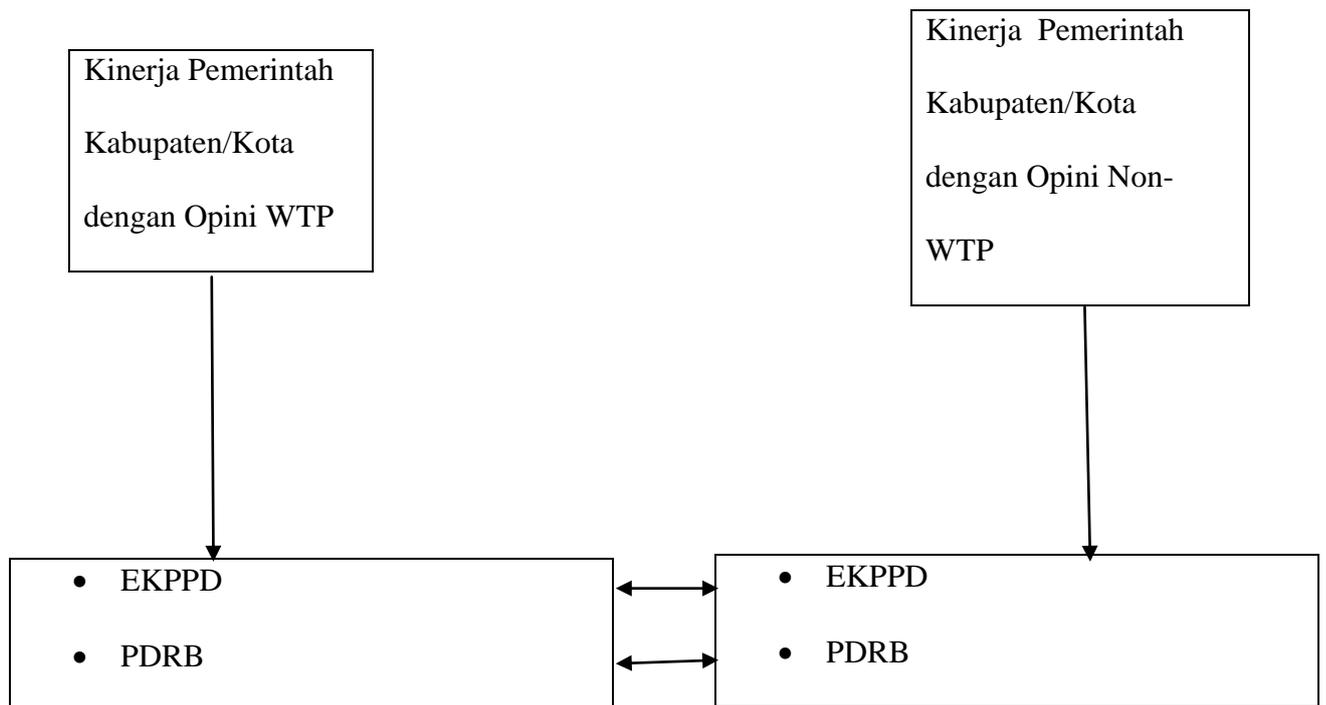
Azhar (2008) melakukan penelitian terkait dengan analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten atau kota sebelum dan setelah otonomi daerah. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, upaya fiskal, tingkat kemandirian pembiayaan, dan rasio efisiensi penggunaan anggaran. Metode analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian ini adalah uji beda t-test untuk sampel yang dipasangkan (Paired T-Test). Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk desentralisasi fiskal, upaya fiskal, serta kemampuan pembiayaan sebelum dan sesudah otonomi daerah. Namun, tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Mirza (2012) meneliti perbedaan kinerja keuangan pemerintah pusat saat mendapat opini *disclaimer* dan saat mendapat opini *qualified*. Indikator kinerja keuangan yang diuji dalam penelitian ini yaitu rasio keuangan likuiditas, rasio keuangan solvabilitas, rasio keuangan efektivitas pendapatan, rasio keuangan efisiensi belanja, rasio keuangan pertumbuhan pendapatan dan rasio keuangan pertumbuhan belanja. Metode analisis yang digunakan dengan metode uji beda *paired t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah dalam bentuk likuiditas, solvabilitas, efektivitas pendapatan efisiensi belanja, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja periode opini audit *disclaimer* sama dengan *qualified*. Tidak ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah pusat periode opini audit *disclaimer* dan *qualified*.

Khairudin (2013) meneliti perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan non-WTP tahun anggaran 2011. Indikator kinerja keuangan yang diuji dalam penelitian yaitu Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas Keuangan Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Pertumbuhan Keuangan Daerah. Metode

analisis yang digunakan dengan metode uji beda *paired t-test*. Implikasi teoritis penelitian ini temuan ini memberikan bukti empiris bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP lebih baik dan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Model Penelitian



Gambar 1.1

2.4. Hipotesis

Laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan

perundangundangan (Syamsi,1986: 199 dalam Susantih, 2008). Semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerahnya semakin baik dan demikian pula sebaiknya (Halim, 2002). Sedangkan opini audit menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Artinya opini audit merupakan suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan.

Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kementerian/lembaga, maka laporan keuangan pemerintah daerah perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Kawedar, 2008). Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan opini audit yang merupakan suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Namun opini audit yang diperoleh kementerian/lembaga belum dapat dijadikan parameter atau jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena opini audit hanya terbatas pada masalah administratif saja.

Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Kinerja penyelenggaraan pemerintahan salah satunya dapat diukur dengan melihat skor EKPPD. Sedangkan kinerja pemerintah daerah

dalam hal pengelolaan keuangannya tercermin pada laporan keuangan daerah. Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Dengan didaptkannya opini wajar tanpa pengecualian terhadap suatu kabupaten/kota, diharapkan kinerja pemerintah daerah, dilihat dari pertumbuhan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar kepada masyarakat di kabupaten/kota tersebut juga telah lebih baik daripada kabupaten/kota yang belum menerima opini wajar tanpa pengecualian. Khairudin (2013) menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP lebih baik dan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang beropini Non WTP.

EKPPD menunjukkan sebaik apa pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya sedangkan opini audit menunjukkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan pemerintah dalam mengelola keuangannya. Jika pengelolaan keuangan suatu daerah sudah baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga baik, yang mengindikasikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

H1: Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang beropini WTP berbeda secara signifikan dari yang beropini non-WTP.

Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian seharusnya juga secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya daerahnya. Dengan didaptkannya opini wajar tanpa pengecualian terhadap suatu kabupaten/kota, diharapkan kinerja ekonomi, dilihat dari pertumbuhan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan

pelayanan dasar kepada masyarakat di kabupaten/kota tersebut juga telah lebih baik daripada kabupaten/kota yang belum menerima opini wajar tanpa pengecualian.

Opini audit didapatkan dari pengelolaan keuangan yang baik yang dilakukan pemerintah daerah dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Brata (2002) menemukan secara empiris bahwa sumber daya manusia yang berkualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi regional di Indonesia.

Kinerja merupakan hasil yang didapat dari sebuah proses kegiatan yang cukup panjang (Khairudin, 2013). Begitu juga dengan kinerja ekonomi pemerintah daerah yang tentunya lahir dari sebuah proses kegiatan yang cukup panjang pula yang biasa disebut dengan kegiatan pengelolaan dana APBD demi pembangunan daerah yang diawali dari perencanaan sumber daya sampai dengan pengendalian. Jika proses kegiatan pembangunan daerah berjalan dengan baik dan benar, maka dapat dipastikan bahwa kinerja ekonomi pemerintah daerah akan semakin baik juga. Karena semakin baik kinerja ekonomi suatu pemerintah daerah mengandung arti bahwa pengelolaan sumber daya daerah demi kesejahteraan masyarakatnya semakin baik dan demikian pula sebaliknya (Halim, 2002). Sedangkan opini audit menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Artinya baik atau buruknya opini atas laporan keuangan

ditentukan oleh baik atau buruknya sistem administrasi yang ada, termasuk didalamnya apakah anggaran yang dimiliki telah tepat sasaran.

Menurut Mahmudi (2006), opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya mencerminkan kualitas laporan keuangan yang disajikan saja dan tidak secara langsung mencerminkan pengelolaan sumber daya demi kepentingan pembangunan di daerah tersebut. Artinya pemerintah daerah yang hasil opininya baik, belum tentu kinerja ekonominya juga baik, dan berlaku sebaliknya. Hasil penelitian Budiarta (2008) yang melakukan penelitian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2006 dan 2007 yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan opini berupa *disclaimer* untuk tahun 2006 dan 2007 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah pusat tahun 2007 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006, meskipun opini audit untuk tahun 2006 dan 2007 adalah *disclaimer* yakni opini yang paling buruk.

H2: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota yang beropini WTP berbeda secara signifikan dari yang beropini non-WTP.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga dapat diakibat karena adanya kenaikan harga-harga barang sehingga PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan riil dari ekonomi

suatu daerah tanpa memperhitungkan adanya inflasi. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Dengan didapatkannya opini wajar tanpa pengecualian merupakan gambaran kegiatan pengelolaan dana pemerintah dengan baik. Jika proses kegiatan pembangunan daerah berjalan dengan baik dan benar, maka dapat dipastikan bahwa kinerja ekonomi pemerintah daerah akan semakin baik juga.

H3: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan kabupaten/kota yang beropini WTP berbeda secara signifikan dari yang beropini non-WTP.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sampel dan Data Penelitian

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa skor EKPPD secara nasional tahun 2011-2013 dan data PDRB setiap kabupaten/kota di Indonesia tahun 2010 dan 2013

3.2 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah dengan indikator pengukuran melalui: Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Data yang digunakan merupakan skor EKPPD Kabupaten/Kota secara nasional tahun 2011-2013 yang diperoleh dari halaman situs Kementerian Dalam Negeri. Kriteria penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-251 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Skor	Status
3-4	Sangat Tinggi
2-3	Tinggi
1-2	Sedang
0-1	Rendah

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-251 Tahun 2014

Produk Domestik Regional Bruto

Data yang digunakan merupakan perubahan PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2010 sampai tahun 2013 yang dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan 2000. Data PDRB diperoleh dari halaman situ Badan Pusat Statistik dan diolah dari perhitungan perubahan PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2010 sampai tahun 2013.

3.3 Metode Analisis Data.

3.3.1 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penting dilakukan karena untuk menentukan alat uji statistik apa yang sebaiknya digunakan pengujian hipotesis. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik (Ghozali, 2005). Penentuan normal tidaknya data ditentukan dengan cara, apabila hasil signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan ($\geq 0,05$) maka H_0 diterima maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya apabila signifikansi uji lebih kecil dari nilai signifikansi ($< 0,05$) H_0 ditolak maka data tersebut terdistribusi tidak normal.

3.3.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk variabel penelitian ini menggunakan uji beda *Independent Sample t-Test software* SPSS 19.0. Uji beda *Independent Sample t-Test* ini digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok sampel yang tidak berhubungan, yaitu yang beropini WTP dengan Non WTP (Wiyono, 2011:240).

BAB V. SIMPULAN, IMPLIKASI KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan indikator evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda secara signifikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang Non WTP tahun anggaran 2011-2013.
2. Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan indikator produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku berbeda secara signifikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang Non WTP tahun anggaran 2011-2013.
3. Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP dengan indikator produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan berbeda secara signifikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang Non WTP tahun anggaran 2011-2013.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini Non WTP, maka penelitian ini mempunyai implikasi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, temuan ini memberikan bukti secara empiris bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini

WTP berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini Non WTP. Agar suatu daerah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakatnya, organisasi publik harus bersedia menyiapkan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingannya atau *stakeholder* (Mahmudi, 2006). Kabupaten/kota yang berhasil meraih opini WTP terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan jika dilihat dari kesejahteraan dan kelayakan hidup masyarakatnya. Sedangkan secara praktis, temuan ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para *stakeholder* untuk tidak mengabaikan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pertumbuhan produk domestik regional bruto yang merupakan salah satu komponen perhitungan produk domestik bruto nasional, dan opini audit dalam pengambilan keputusan, agar kabupaten/kota di Indonesia menjadi daerah yang benar-benar berkualitas, baik secara pengelolaan keuangannya, penyelenggaraan pemerintahannya, pertumbuhan ekonominya, maupun juga secara kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan. Satu di antaranya adalah terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.07/2011 tentang pemberian dana insentif daerah yang memasukkan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan, yang merupakan kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap kinerja dan upaya daerah, meliputi daerah yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, daerah yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan tingkat kemiskinan nasional, daerah yang mampu mengurangi tingkat pengangguran di atas rata-rata pengurangan tingkat pengangguran nasional, dan daerah yang memiliki Kemampuan fiskal daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di atas atau di bawah rata-rata nasional.

Pada aspek pelayanan umum, sebaiknya ditambahkan indikator jumlah pasar tradisional yang tergolong baik, karena tergolong sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh

pemerintah. Lingkungan yang bersih dapat mempertahankan kesehatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Perbandingan kinerja yang digunakan pada penelitian ini terbatas hanya pada kinerja yang beropini WTP dan Non WTP saja. Sehingga hasil penelitian ini tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota untuk yang beropini WDP, Tidak Wajar (TW), dan tidak Memberikan Pendapat (TMP). Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang beropini WDP, Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
2. Indikator pengukuran kinerja yang digunakan pada penelitian ini terbatas hanya pada skor EKPPD dan Pertumbuhan PDRB. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas indikator pengukuran dengan menambahkan indikator pengukuran kinerja lainnya, sehingga hasil penelitian akan lebih baik lagi dan dapat digeneralisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Irdam. (2011). *Regional Fiscal Independence In East Java Province Post Regional Autonomy. Economic Journal of Emerging Markets.*
- Azhar, MHD Kaerya Satya. 2008. *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan sesudah otonomi daerah.* Tesis. Universitas Sumatera Utara
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. United Nations Development Programme (UNDP). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007. Building and Reinventing Decentralised Governance (BRIDGE).*
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.* Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2002. *Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia.* Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Budiartha, Ketut. 2008. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2007.* Semarang. Jurusan Akuntansi FEB Universitas Diponegoro.
- Chariri, Anis dan Ghozali, Imam. 2007. *Teori Akuntansi.* Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Dewi, Shita Hertanti. 2015. *Kinerja Pembangunan Daerah : Suatu Evaluasi Terhadap Kursus Keuangan Daerah.* Tesis. Institut Pertanian Bogor
- Evana, Einde. 2012. *Jangan Geer Dapat WTP.* Tribun Lampung No. 1242/Tahun IV
- Freeman, R. Edward dan Veal, John Mc. 2002. *A Stakeholder Approach to Strategic Management.* Working Paper No. 01-02. Darden Graduate School of Business Administration University of Virginia
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halachmi, Arie. 2005. *Performance Measurement Is Only One Way Of Managing Performance.* Emerald Insight issued 2005.
- Halim, Abdul. 2002. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi.* Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Hamzah B. Uno. 2008. *Teori Motivasi Dan Pengukurannya Analisis Di Bidang Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara
- Heriningsih, Suchyo, 2014. *Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada dan Kota di Indonesia.* Jurnal Ekonomika Vol. 2, No. 2, Desember 2008.

- Kasmir, (2008). Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kawedar, Warsito; Rohman, Abdul; Handayani, Sri. 2008. *Akuntansi Sektor Publik. Pendekatan Penganggaran Daerah Dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Buku 1. Penerbit: Universitas Diponegoro
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 120-251 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional Tahun 2012
- Khairudin. 2013. *Does Financial Performance Of Local Government Influence On The Audit Agency Opinion?. Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 4, No. 1, Maret
- Krisna. 2008. *Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres dan Konflik Kerja terhadap Kinerja karyawan di PT. Bank Sri Partha Kantor Pusat Denpasar*, Tesis Program Universitas Udayana Denpasar
- Mahmudi. 2006. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Mandell, Lewis. 2006. *Financial Literacy: If It's So Important, Why Isn't It Improving?.* Indiana State University.
- Mardiasmo. (2006). *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.1. Hal 1-17. <http://www.bppk.depkeu.go.id>.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mirza, Rifka Amalia. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Sampai Tahun 2010*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriyani. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya
- Noviando, Henanda Bimo. 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Otonomi Baru Di Indonesia*. Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Indonesia. 2009-2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta

Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crespent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sedyaningsih, Peni dan Achmad Zaky. 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. 2015

Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. 2008. —*Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan*. Simposium Nasional Akuntansi XII.

Syamsi.1986. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta. Bina Aksara

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga jilid 1*. Jakarta : Erlangga

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Westin, Susan S. 1998. *Performance Measurement and Evaluation Definition and Relationship*. GAO issued May 2005

Wiguna, Van Indra. 2013. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*. Tesis. Universitas Brawijaya

Wiyono, Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Statistik SPSS & SmartPLS*. Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.